

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupatennya berada di kota Kefamenanu. Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 Kecamatan, 33 kelurahan dan 160 desa dengan luas wilayahnya sekitar 2.669,70 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 256.174 jiwa (Situs web: <http://www.ttukab.go.id/>).

Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008, mengingat pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), memutuskan penetapan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) . BNPB merupakan badan yang menangani masalah kebencanaan dalam hal prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk menanggulangi bencana di Indonesia, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka masing-masing pemerintah daerah harus memulai meningkatkan kemampuannya untuk secara mandiri dapat mengatasi permasalahan kebencanaan didaerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun

2009, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 8) dan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memutuskan penetapan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan mulai beraktifitas pada 17 Mei 2011.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana. Kondisi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Berikut ini disajikan informasi bencana yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

### Data 1.1

Tabel bencana yang terjadi di Kab.TTU

No	Kasus	Daerah/wilayah	Upaya Penanggulangan
1	Banjir	Kecamatan biboki selatan, kelurahan tubuhue, kelurahan benpasi, kelurahan kefa utara, kelurahan kefa selatan, kelurahan bansone, desa popnam (noemuti)	Penyelamatan dan evakuasi korban serta pemenuhan kebutuhan dasar
2	Kebakaran	Kelurahan tubuhue, kelurahan bansone, kelurahan kefa tengah, desa kotafoun, desa bijaepasu, desa oelneke, desa napan, desa tanpah, desa maurisu, desa oepura utara, desa haumus (wini)	Penyelamatan dan evakuasi korban, pemberian seng kepada korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar
3	Angin puting beliung	Kelurahan tubuhue, kelurahan benpasi, kelurahan bansone, kecamatan musi, kecamatan bikomi nilulat, desa nifuboke, kecamatan biboki anleu (SDN Genturi), desa batnes, desa taunbaen	Penyelamatan dan evakuasi korban, pemberian seng kepada korban yang rumahnya terkena angin puting beliung

Sumber data: BPBD Kabupaten TTU tahun 2021

Banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran yang dimulai dari kerugian materi serta menimbulkan korban jiwa, maka penanganan masalah tersebut harus dilakukan dengan serius. Pasalnya bencana tersebut dapat mengganggu

proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah manajemen penanggulangan bencana dimulai pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat/bencana, dan pasca bencana dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk di pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Timor Tengah Utara untuk di daerah, serta pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*) di dalamnya untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi.

Adapun dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana ialah : Cepat dan Akurat, Prioritas, Koordinasi, Keterpaduan, Berdaya Guna, Berhasil Guna, Transparansi, Akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Nondiskriminasi, dan Nonproletisi.

Upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu: Kegiatan pencegahan bencana, Kesiapsiagaan, Peringatan dini, Mitigasi, Tanggap darurat bencana, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi.

Upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, pakaian, beras, air bersih, seng, peralatan dapur, dan peralatan mandi.

Kinerja merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan

keberhasilan suatu organisasi. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang dapat diartikan sebagai hasil kerja. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kinerja kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu terjadi tidak seperti seharusnya. Kinerja dari pegawai atau karyawan dapat dinilai dari sejauh mana dia dapat melakukan tugas-tugasnya. Kinerja aparatur pemerintah di masa lalu pada umumnya diukur dari kemampuannya menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma demikian tidak salah terutama apabila diingat bahwa fungsi dari birokrasi yang menonjol pada masa lalu ialah fungsi pengaturan. Dimasa sekarang dan yang akan datang fungsi tersebut tetap harus diselenggarakan seefektif mungkin. Hanya saja karena banyak fungsi-fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya dimasa depan, diperlukan kriteria yang berbeda untuk menilai kinerja birokrasi sebagai suatu kesatuan utuh. Dengan kata lain, birokrasi masa depan semakin dituntut untuk menyelenggarakan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan administratif dengan kinerja yang baik.

Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas.

Di sisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan

secara objektif, disebabkan karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja suatu program hanya lebih ditekankan pada kemampuan suatu program menyerap anggaran. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah ataupun programnya, maka seluruh aktivitas yang ada harus diukur, dan pengukuran tersebut tidak hanya dilihat dari *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada *output* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat) dan *impacts* (dampak).

BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. BPBD di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Adapun tugas dari lembaga ini adalah:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginventarisir peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu dibutuhkan kinerja yang baik dari BPBD agar segala bencana alam yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditanggulangi dengan baik dan cepat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten TTU).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengatasi bencana-bencana yang terjadi di sekitar serta apa saja upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan penanggulangan bencana.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan penanggulangan bencana.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai aplikasi pengetahuan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta menambah kepustakaan dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten TTU.